

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Danau Rawa Pening, yang terletak di Kabupaten Semarang, meliputi dari 4 Kecamatan Tuntang, Bawen, Banyubiru dan Ambarawa merupakan salah satu aset alam yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomis yang besar bagi masyarakat lokal. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, danau ini mengalami degradasi lingkungan yang serius akibat pencemaran air, erosi tanah, dan aktivitas manusia yang tidak terkendali. Pencemaran lingkungan, hilangnya habitat alami, dan penurunan kualitas air telah mengancam keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar danau. Danau Rawa Pening memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat sekitar seperti sebagai irigasi, air baku, pembangkit listrik, pengendali banjir, pariwisata dan sebagai sumber pencarian masyarakat di perikanan. Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana bahwa sebelum pada tahun 1990 Rawa Pening dapat mencapai kedalaman 15 meter, namun pada data tahun 2018 hanya tersisa 3 meter yang disebabkan oleh pendangkalan. (KumparanNews, 2019)

Danau Rawa Pening memiliki luas 6.488,6 ha pada musim penghujan dan 1.650 ha pada musim kemarau. Manfaat dari Danau Rawa Pening untuk sumber kehidupan masyarakat sekitar, berdasarkan data dari (Abimanyu et al., 2016) sebanyak 46.076 petani, 27.739 buruh tani, 2.205 nelayan, 3.746 pengusaha, dan 2.239 peternak atau perikanan(Raharjo et al.,

2019), dari 4 kecamatan di Kabupaten Semarang. Fungsi dari Danau Rawa Pening meliputi: air baku , saluran irigasi untuk pertanian, kegiatan budidaya perikanan, industri pariwisata, sumber energi untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Jelok, kerajinan eceng gondok, dan pemanfaatan gambut untuk bahan dasar pupuk kompos.

***Tabel 1.1 Pemanfaatan Danau Rawa Pening***

Irigasi	Di Tuntang Jelok : 374 Ha Di Glapan Barat : 10113 Ha Di Glapan Timur : 8.671 Ha Suplesi Pelayaran Buyaran : 909 Ha
Air Baku (air minum)	Sumber Air Muncul : 500 ltr/det Kanal Tuntang : 250 ltr/det
Pembangkit Listrik	PLTA Jelok : Terpasang : 4 x 5,12 MW (maksimum 15 MW) PLTA Timo : Terpasang : 3 x 4 MW (maksimum 10,5 MW)
Pengendali Banjir	Mereduksi debit air Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak
Pariwisata	Olah raga air Pemancingan
Perikanan	Budidaya air tawar

*Sumber BBWS Pemali Juana*

Dari beberapa manfaat yang dimiliki Danau Rawa Pening, tidak terlepas dari permasalahan lingkungan dan permasalahan pengelolannya. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang 2016-2021, dijelaskan bahwa terdapat permasalahan pada danau Rawa Pening di antaranya laju sedimentasi yang tinggi dari sembilan anak Sungai, pertumbuhan eceng gondok yang pertumbuhannya tidak terkendali yang menyebabkan pendangkalan pada danau, turunnya sumber daya ikan, pencemaran lingkungan, dan turunnya kualitas air. Konflik kepentingan dalam pemanfaatan Danau Rawa Pening, belum optimalnya konservasi, belum optimalnya kelembagaan dan implementasi kebijakan, tanggung jawab dan kewenangan yang tumpang tindih, serta minimnya pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan di Danau Rawa Pening cukup kompleks seperti permasalahan sedimen yang membuat daya tampung air menurun setiap tahunnya, penurunan kualitas air, pertumbuhan eceng gondok, kerusakan pada daerah tangkapan air, banyaknya keramba jaring apung dan permasalahan lainnya. Tahun 1918 sampai 2021 menunjukkan Danau Rawa Pening mengalami peningkatan luas yang signifikan dari 1129.042 ha menjadi 2228.282 Ha atau meluas sekitar 97% dari luas awal (Wulandari, 2022).

Laju sedimentasi di Rawa Pening terus meningkat pada tahun 2017 sedimentasi meningkat sebesar 4.215.121,59 ton (Indrayati & Hikmah, 2018) Sehingga diperlukan strategi pengelolaan danau berkelanjutan. Pemerintah telah mengupayakan dengan melakukan pengerukan dan

pembangunan pada sungai-sungai yang terhubung dengan Rawa Pening, dalam prosesnya berjalan lambat dalam penanganan permasalahan di Danau Rawa Pening. Selain itu pencemaran juga terjadi karena adanya limbah rumah tangga dan limbah dari peternakan oleh masyarakat sekitar.

Danau Rawa Pening ditetapkan sebagai danau prioritas revitalisasi nasional karena mengalami degradasi dengan tingkat yang cukup tinggi akibat fenomena eutrofikasi berupa blooming eceng gondok. Residu dari kegiatan industri, pertanian, peternakan, hingga aktivitas domestik yang bermuara di Danau Rawa Pening berkontribusi besar atas tingginya kandungan nutrisi, sehingga laju fenomena eutrofikasi sulit dikendalikan. Selain berdampak negatif terhadap kualitas perairan dan biota yang berada di dalamnya, fenomena ini mengganggu aktivitas ekonomi penduduk yang umumnya adalah nelayan dan penyewa perahu (Fitriani et al., 2019).

Danau Rawa Pening posisinya di cekungan terendah dengan adanya tiga gunung yang mengelilinginya. Oleh karena itu sumber air Danau Rawa Pening berasal dari air limpasan daerah yang berada di sekitar dengan membawa segala sisa dari aktivitas manusia, berbagai unsur serta senyawa di danau. Dari setiap aktivitas-aktivitas tersebut akan membuat adanya limbah yaitu adanya kandungan logam berat yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitar. akumulasi logam berat ini tentunya akan ikut dibawa air hujan ke Daerah Tangkapan Air (DTA) Rawa Pening. Eceng gondok yang tumbuh secara cepat di Danau Rawa Pening dipicu dari dalam danau memiliki banyak nutrisi sehingga mempercepat perkembangannya.

Di lain sisi eceng gondok sebagai penanda adanya indikator kandungan logam berat, hal ini sesuai dengan fungsi dari eceng gondok sebagai tanaman fitoremediasi logam berat pada air. Logam berat adalah salah satu bahan berbahaya yang dapat mencemari air, biasanya logam berat yang asalnya dari alam telah ada di dalam tanah maupun dari pelapukan batuan induk. Sedangkan logam berat dari antropogenik merupakan sisa aktivitas perindustrian, pertanian, hingga kegiatan rumah tangga atau limbah domestik. Dari pencemaran logam berat di daerah perairan akan menjadi sedimen dan dalam jangka waktu akan terus bertambah, sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitar perairan.

Dalam upaya mengatasi tantangan ini, pemerintah setempat dan berbagai pemangku kepentingan telah memulai program revitalisasi Danau Rawa Pening. Revitalisasi ini tidak hanya mencakup rehabilitasi fisik danau, tetapi juga melibatkan upaya untuk meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun program revitalisasi telah dimulai, tantangan dalam implementasi tata kelola lingkungan yang efektif dan berkelanjutan masih ada. Peran masyarakat, kebijakan lingkungan, serta koordinasi antar instansi dan pihak-pihak terlibat merupakan aspek-aspek kunci yang harus diperhatikan dalam mengelola lingkungan Rawa Pening secara berkelanjutan.

Salah satu proyek yang dilakukan pemerintah adalah proyek revitalisasi Danau Rawa Pening yang dimulai pada tahun 2021 dengan dana sebesar Rp.99.287.853.000,00. Pada tahap I paket I dengan menggunakan

dana APBN 2022. Selanjutnya dilaksanakan revitalisasi tahap I Paket II dengan anggaran Rp.3.800.000.000,00 (*LPSE Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Informasi Tender*, n.d.). Revitalisasi Rawa Pening dilaksanakan oleh BBWS Pamali Juana dan pada paket II bekerja sama dengan TNI. Dalam pelaksanaannya program revitalisasi sempat membuat masyarakat sekitar resah. Karena masalah tergenangnya lahan pertanian masyarakat dan adanya tidak setujuan masyarakat karna Keputusan Menteri PUPR No 356/KPTS/M?2020 tentang penetapan garis sempadan Danau Rawa Pening serta adanya keramba apung yang akan dibersihkan.

Penelitian ini menarik karena beberapa alasan di antaranya, Pertama, bahwa program revitalisasi merupakan salah satu program nasional tentang penyelamatan danau prioritas nasional salah satunya Rawa Pening (Humasjateng, 2022), Namun program ini baru mulai direalisasikan pada tahun 2021-2023. Proyek ini sempat mendapat penolakan dari masyarakat sekitar Danau Rawa Pening dikarenakan akan berdampak pada ekonomi warga yang bergantung pada danau terutama kegiatan menangkap ikan. Pening dikarenakan akan berdampak pada ekonomi warga yang bergantung pada danau terutama kegiatan menangkap ikan.

Kedua, Penelitian kasus ini belum banyak penulis temukan sebelumnya, hanya ada beberapa tulisan menyinggung proyek revitalisasi danau ini. Dari penjelasan tersebut, Danau Rawa Pening memiliki banyak permasalahan pendangkalan sehingga pemerintah menjadikannya danau prioritas nasional yang perlu diselamatkan dengan program Revitalisasi

guna mengembalikan fungsi alami danau karena adanya pendangkalan sedimentasi di danau (Humasjateng, 2022)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola lingkungan dalam konteks revitalisasi Rawa Pening. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi penting untuk upaya pelestarian dan pemulihan lingkungan Rawa Pening serta memberikan inspirasi bagi proyek-proyek revitalisasi serupa di wilayah lain.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan satu pertanyaan penelitian yaitu bagaimana tata kelola lingkungan dalam revitalisasi Danau Rawa Pening?

## 1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola lingkungan yang terjadi pada revitalisasi Danau Rawa Pening.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mengelola Danau Rawa Pening.

## 1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini dibagi menjadi 2, sebagai berikut:

#### A. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat sebagai pengetahuan pentingnya berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Danau Rawa Pening.
- b. Bagi pemerintah sebagai dasar yang kuat untuk pengembangan dan perbaikan kebijakan, termasuk kebijakan revitalisasi Danau Rawa Pening

#### B. Manfaat Teoritis

Dapat menambah dan menjadi bahan referensi pengetahuan terkait penelitian sejenis berikutnya yang akan datang..

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat riset yang telah dilakukan mengenai tata kelola lingkungan di Rawa Pening Kabupaten Semarang yang dilaksanakan sebagai pustaka acuan dalam riset ini. Penelitian ini menggunakan 10 artikel jurnal yang berbeda-beda. Tinjauan Pustaka memiliki tujuan untuk mencari tahu letak persamaan dari penelitian yang akan dikaji dan juga mencari informasi/data untuk mendapatkan perbedaan dari kajian-kajian sebelumnya. Literatur pada penelitian ini dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu: terkait pengelolaan lingkungan hidup, kedua terkait permasalahan yang ada di danau rawa pening dan ketiga terkait partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan Danau Rawa Pening.

Pada kategori pertama terkait kajian pengelolaan lingkungan hidup di Danau Rawa Pening dikaji oleh (Nadjib, 2016) menjelaskan dari kegiatan pemanfaatan bebas Rawa Pening karena adanya polarisasi kepentingan

mengakibatkan munculnya degradasi lingkungan, sehingga perlu adanya perubahan dalam pengelolaan menjadi paradigma pengelolaan secara kolaboratif berbagai stakeholder. Dalam penelitian (Suawa et al., 2021)

Pada pengelolaan dana Revitalisasi Danau Tandano masih banyak kekurangan seperti perencanaan yang belum maksimal, pengigranisasin belum efektif. Pelaksanaan pembuatan tanggul yang masih perlu dibenahi dan pengawasan yang perlu ditingkatkan lagi. Dalam penelitian (Raharjo et al., 2019) menjelaskan tentang Germadan sebagai bentuk kebijakan dalam mengelola danau dengan dibentuknya kelembagaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian Danau Rawa Pening, namun germadan gagal karena dalam partisipasi yang kurang saat perencanaan dan pelaksanaan program yang tidak efektif.

Dalam penelitian (Lois et al., 2018) menunjukkan dalam menerapkan ekologi dilakukan dengan mengelola kawasan bersama keanekaragaman hayati serta perbaikan dalam model ekosistem, hal ini disesuaikan dengan prinsip kenyamanan. Hasil dari desain konservasi ekologis meliputi mengolah lanskap dan vegetasi filtrasi, dermaga, pemancingan dan keramba.

Pada kategori kedua terkait permasalahan yang ada di Danau Rawa Pening pada penelitian yang dilakukan oleh (Mujiburohman & Andari, 2023) menunjukkan bahwa masalah yang ada pada danau yaitu pembersihan gulma eceng gondok, sawah yang terdampak pasang surut dan bangunan yang berada di atas danau dan sempadan danau, dari permasalahan tersebut

terdapat solusi yaitu revitalisasi danau. Kajian dari (Wulandari, 2022b) menunjukkan bahwa Rawa Pening terdapat ekspansi yang cukup parah selama satu abad terakhir yang disebabkan oleh sedimentasi yang terjadi sepanjang tahun, dari permasalahan tersebut pemerintah mengusulkan revitalisasi namun rencana ini mendapatkan penolakan dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Alfianto et al., 2021) menunjukkan sedimentasi di danau rawa pening cukup parah disungai Panjang sebanyak 86.221,8 ton, Torong atau Galeh 45.138.24 ton, legi 42.404,04 ton, parat 28.579,32 ton, sraten 25.988,76 ton, kedung ringgis 6,955,2 ton, guna mengatasi permasalahan sedimentasi di Rawa Pening tidak cukup jika hanya menggunakan penanganan secara struktural, namun diperlukan penanganan dari segi non struktural yaitu mengembalikan fungsi lahan di daerah hulu.

Kategori ketiga terkait partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Rawa Pening seperti pada penelitian dari (Sadewo et al., 2022) menunjukkan bahwa prediksi laju sedimentasi di Sub DAS Rawa Pening dalam kondisi yang kurang baik, meskipun begitu dalam upaya penyelamatan Sub DAS mendapat banyak dukungan dari pihak-pihak terkait salah satunya dari BBWS Pemali Juanan dengan programnya berbasis konservasi. Kajian oleh (Haryanti, 2017) menunjukkan bahwa pemerintah mengembangkan program remediasi Danau Rawa Pening yaitu dengan aplikasi sains dan teknologinya, mengembangkan kelembagaan untuk meningkatkan tata kelola danau, dan meningkatkan peran masyarakat dalam konservasi danau. Dari program tersebut dijabarkan ke program yang

dapat melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif seperti mengendalikan eceng gondok, implementasi pertanian ramah lingkungan dan keterlibatan masyarakat di kegiatan konservasi.

Dalam penelitiannya (Abdiyani et al., 2021) menunjukkan bahwa petani yang mempunyai lahan di daerah tangkapan air di hulu Danau Rawa Pening telah bertindak melaksanakan kegiatan konservasi air dan tanah guna pengurangan erosi, sedimentasi dan eutrikikasi.

***Tabel 1.2 Tinjauan Pustaka***

No.	Jenis	Penulis	Temuan
1.	Pengelolaan lingkungan hidup	(Nadjib, 2016), (Suawa et al., 2021), (Raharjo et al., 2019) dan (Lois et al., 2018)	Dalam pengelolaan danau masih memiliki kekurangan baik dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta partisipasi
2.	Permasalahan yang ada di danau rawa pening	(Mujiburohman & Andari, 2023), (Wulandari, 2022), dan (Alfianto et al., 2021)	Danau Rawa Pening memiliki banyak permasalahan sedimentasi yang cukup parah

			sehingga muncul solusi revitalisasi
3.	Partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan danau rawa pening	(Sadewo et al., 2022), (Haryanti, 2017), dan (Abdiyani et al., 2021)	Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mengelola Danau Rawa Pening dengan baik, serta berupaya melibatkan partisipasi masyarakat

Berdasarkan kajian di atas terdapat penelitian terdahulu yang meneliti terkait tata kelola lingkungan di danau yang memiliki permasalahan masih belum berjalan dengan karena kurangnya koordinasi dan peran dari pihak terkait. Selain itu dari kajian terdahulu terlihat permasalahan yang ada pada Danau Rawa Pening sehingga pemerintah mencetuskan upaya revitalisasi guna penyelamatan Danau Rawa Pening.

Kajian terdahulu membahas upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar Danu Rawa Pening. Dari kajian tersebut penulis ingin mengkaji pada implementasi kebijakan oleh pemerintah dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan revitalisasi danau Rawa Pening baik dalam pengambilan keputusan maupun saat pelaksanaan.

## 1.6 Kerangka Teori

### 1. Tata Kelola Lingkungan (*Environmental governance*)

Menurut (Ulum & Ngindana, 2017:7) dalam buku yang berjudul *Environmental Governance* Isu, Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan, tata kelola lingkungan didefinisikan sebagai suatu interaksi multi-level dari lokal, nasional, dan global, namun interaksinya tidak terbatas hanya pada tiga aktor utama yaitu: *state*, *private* dan *civil society*. Aktivitas interaksi dilakukan secara formal dan informal dalam formulasinya dan implementasi kebijakan untuk merespon dari tuntutan dan masukan dari masyarakat terkait lingkungan dengan tujuan untuk tercapainya Pembangunan berkelanjutan.

Menurut Syahrul (2012:15) dalam bukunya hukum lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya untuk pelestarian lingkungan di antaranya: kebijakan, penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengembangan, pemulihan dan pengendalian lingkungan. pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan asas tanggung jawab, keberlanjutan dan pemanfaatan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan

Dalam konsep *environmental governance* juga dikenal sebagai tata kelola lingkungan, negara dan masyarakat keduanya dianggap sebagai subjek dan objek. Kedua konsep ini terkait dengan upaya pelestarian lingkungan. Sebagai organisasi, negara mengontrol kekuasaan dan sumber daya mereka serta memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi lingkungan secara signifikan. Oleh karena itu, seberapa baik sebuah negara

mengikuti prinsip-prinsip lingkungan dalam membuat kebijakan dan keputusannya dapat menentukan nasib kelestarian lingkungan.

Dalam pengelolaan lingkungan, konsep pemerintahan didefinisikan sebagai kerangka pemikiran sebuah bagaimana negara dan penduduknya berinteraksi dengan pengelolaan lingkungan hidup. Sangat penting untuk diingat bahwa negara bertanggung jawab untuk tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi lingkungan tetapi juga untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan standar ekologi (Purniawati et al., 2019)

(Siahaan dalam Purniawati et al., 2020) mengatakan prinsip *good environmental governance* dalam implementasi tata kelola negara yang baik diperlukan tata kelola lingkungan yang berlandaskan dengan keberlanjutan dari sumber daya. Tata kelola lingkungan yang baik menjadi aktivitas yang penting untuk mencapai keberhasilan dalam menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dan agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Aktivitas tersebut perlu dilakukan secara transparansi, oleh lembaga lingkungan, dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta program melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Balbase *good environmental governance* adalah suatu aktivitas penting dalam menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini memerlukan transparansi sistem pada instansi lingkungan, kebijakan dan

program-program yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.

Sedangkan, menurut Budiati *Good Environmental Governance* merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah negara dengan melibatkan semua anggota masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan tetap memperhatikan kelestarian dari lingkungan, Dalam tata kelola pemerintahan terdapat tiga bagian yaitu lembaga publik, tata kelola perusahaan atau swasta dan *civil society*, hubungan ketiga bagian tersebut harus selaras, bersinergi dan kendali. (Budiati, 2012)

Menurut Belbase(2010) dalam (Addahlawi et al., 2019) terdapat 7 indikator prinsip *Good Environmental Governance* sebagai berikut :

1. Aturan hukum (*the rule of law*) merupakan cara mengelola masyarakat. Karena hukum mempunyai kebebasan untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan prosedur atau hukum yang berlaku. Hal ini tentang cara penegakan hukum dan masyarakat bertindak sesuai aturan yang berlaku, bukannya bertindak melanggar hukum.
2. Partisipasi (*participation*) adalah peran serta komponen-komponen dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai baik secara material maupun non material.
3. Akses terhadap informasi (*access to information*) merupakan alat untuk kemudahan masyarakat dalam memberikan dan mendapatkan informasi publik.

4. Tranparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*). Prinsip ini menjamin akses bebas terhadap informasi sehingga setiap orang mendapat informasi tentang kebijakan, prosedur, implementasi dan hasil. Prinsip akuntabilitas menjamin bahwa seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
5. Desentralisasi (*decentralitation*) Prinsip desentralisasi adalah suatu kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri.
6. Lembaga dan Institusi (*institutions and agencies*) merupakan organisasi yang berperan dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Organisasi yang disebutkan dalam tersebut dapat berupa organisasi pemerintah, organisasi swasta, dan organisasi kemasyarakatan.
7. Akses untuk memperoleh keadilan (*aces to justice*) memiliki arti seluruh orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan di masyarakat.

## 2. Pembangunan Berkelanjutan

(M. Permana, 2021) menyatakan sejak dikenalkannya konsep pembangunan berkelanjutan di tahun 1987, yang dikenal dengan Brundtland Report oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (WCED), literasi terkait teori pembangunan berkelanjutan belum ditemukan, Laporan dari Brundtland hanya menjelaskan bahwa permasalahan lingkungan global, termasuk akibat kemiskinan dan pola konsumsi serta produksi yang tidak berkelanjutan. Pembangunan

berkelanjutan menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

*“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi Pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”*

Menurut Perserikatan Bangsa - Bangsa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang (Cahyani, 2020). Pembangunan berkelanjutan memiliki arti bahwa pembangunan yang akan berlangsung secara berkelanjutan dan konsisten dengan tetap menjaga kualitas dari hidup masyarakat, tidak dengan merusak lingkungan dan cadangan sumber daya yang ada dipertimbangkan untuk dimasa mendatang (Sudirman, 2018).

Tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang memiliki 17 tujuan dan 169 target, menjadi suatu komitmen untuk pelaksanaan SDGs, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Konsep ini diharapkan dapat mewujudkan keserasian dalam sektor pembangunan dan tidak terjadinya kerusakan lingkungan sebagai ekosistem untuk keberlangsungan hidup generasi selanjutnya.

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Pembangunan berkelanjutan memiliki 3 lingkup cakupan kebijakan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Pembangunan hijau umumnya dibedakan dari pembangunan berkelanjutan, pembangunan hijau mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya. Bagi yang mendukung pembangunan berkelanjutan beranggapan bahwa konsep ini menyediakan konteks bagi berkelanjutan menyeluruh dimana pemikiran muktahir dari pembangunan hijau sulit diwujudkan. (Sudirman, 2018)

Sedangkan menurut Haris dalam konsep keberlanjutan dapat dibagi menjadi tiga dimensi pemahaman yaitu: 1). Keberlanjutan ekonomi diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara terus menerus untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan dan menghindari ketidakseimbangan sektoral yang dapat merugikan produksi pertanian dan produksi industri, 2). Kelestarian lingkungan hidup harus mampu menjaga kestabilan basis sumber daya, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi serap lingkungan hidup. Konsep ini juga terkait dengan pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas udara dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk dalam sumber daya ekonomi. 3). Keberlanjutan sosial, diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, akuntabilitas politik (Jaya, 2004)

## 1.7 Definisi Konseptual

### 1. Tata Kelola Lingkungan (*Environmental governance*)

Tata kelola lingkungan merupakan bentuk praktik mengelola sumber daya alam dan lingkungan, dalam implementasinya melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah dan partisipasi masyarakat demi mencapai keberlanjutan lingkungan. Konsep ini melihat dari proses pengambilan keputusan hingga pada implementasi kebijakan yang dibuat guna melindungi, menjaga kelestarian dan memperbaiki keseimbangan ekologi lingkungan dan bagaimana keterlibatan masyarakat di dalamnya.

### 2. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk pendekatan dalam memenuhi kebutuhan manusia sekarang tanpa adanya pengorbanan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan. Pada konteks ini pembangunan digunakan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan, dengan penekanan pada pengurangan tidak setaraan ekonomi dan sosial, serta melindungi lingkungan. Konteks ini mendukung dalam penggunaan sumber daya alam dengan bijaksana, dan melibatkan masyarakat saat mengambil keputusan yang akan berdampak pada kehidupannya.

## 1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional memiliki peran penting untuk menentukan indikator dalam menyelesaikan penelitian ini. Dengan adanya definisi operasional peneliti dapat menggunakan fokus yang ada untuk mengamati

permasalahan tersebut. Hal ini dapat mempermudah peneliti dalam melakukan identifikasi masalah dan penyelesaiannya. Berikut definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

***Tabel 1.3 Indikator Teori Konseptual Tata Kelola Lingkungan menurut Belbase***

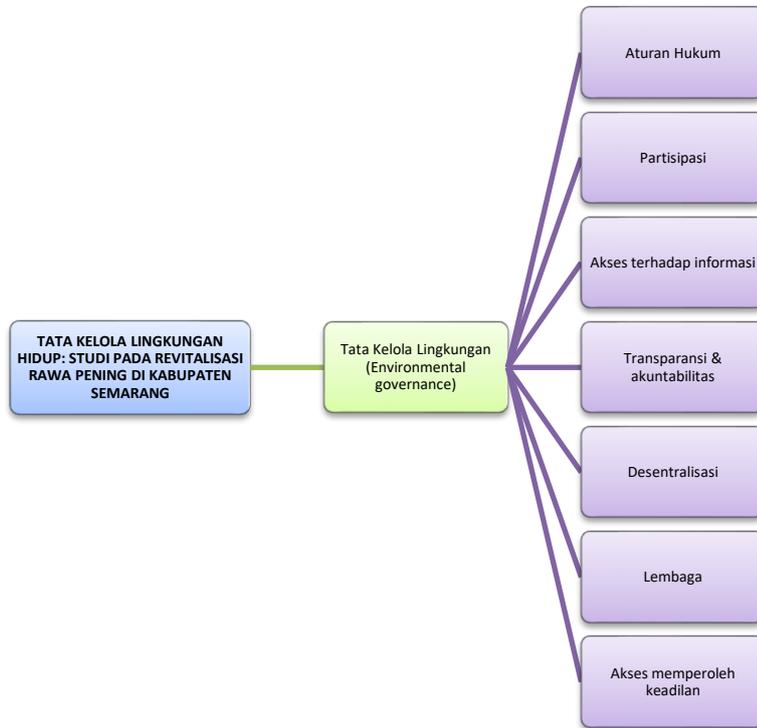
Variabel	Indikator	Parameter
Tata Kelola Lingkungan	Aturan hukum	Adanya aturan hukum untuk mengatur proyek revitalisasi
	Partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran Pemerintah</li> <li>2. Peran Masyarakat lokal</li> <li>3. Peran swasta</li> </ol>
	Akses terhadap informasi	Adanya kemudahan mendapatkan informasi masyarakat tentang revitalisasi
	Transparansi & Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemudahan mendapatkan informasi yang akurat</li> <li>2. Ada dokumen laporan pertanggungjawaban</li> </ol>
	Desentralisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembagian peran pemerintah daerah dengan pemerintah pusat</li> </ol>

		2. Pembagian kewenangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
	Lembaga	Lembaga pelaksana proyek revitalisasi oleh BBWS Pamali Juana
	Akses memperoleh keadilan	Adanya forum dialog untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya

#### 1.9. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini mencoba melihat bagaimana pelaksanaan proyek revitalisasi rawa pening sesuai dengan tata kelola lingkungan (*environmental governance*) dan melihat pada konteks pembangunan berkelanjutan sesuai dengan gambar di bawah ini:

*Tabel 1.4 Kerangka Berfikir*



*Diolah oleh penulis*

## 1.10. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis guna menyusun ilmu pengetahuan (Suryana, 2010). Pada dasarnya penelitian digunakan untuk melihat kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang menjadi kajian penelitian untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mendekati permasalahan yang diteliti dan menemukan jawabannya diperlukan suatu metode penelitian yang memadai. Metode penelitian juga turut akan menentukan tahapan-tahapan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya memahami fenomena setting dan konteks yang natural, artinya peneliti berupaya untuk tidak memanipulasi fenomena yang diamatinya. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian digunakan untuk mengkaji kondisi objek, yang mana peneliti sebagai instrumen utama,

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Bungin dan Creswell dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, metode kualitatif deskriptif merupakan jenis metode kualitatif yang paling banyak dipengaruhi oleh pandangan kuantitatif (Tresiana, 2013). Penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang diperoleh peneliti dari informan untuk memberikan informasi yang menggambarkan penyajian laporan tersebut. Laporan tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan-catatan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan penelitian, peneliti menganalisis data tersebut dan sejauh mungkin menggambarkan sebagaimana aslinya.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah Rawa Pening yang berada di kabupaten Semarang provinsi Jawa Tengah.

## 3. Unit Analisa

**Tabel 1.4 Unit Analisa Data**

<b>No.</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Narasumber</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	1	Kepala Biro Infrastruktur daerah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	1	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana
2.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang	1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
4.	Masyarakat	3	Masyarakat sekitar Rawa Pening
Jumlah		6	

### 1.11 Sumber Data

#### a) Data primer

Data primer adalah jenis data yang mengacu pada informasi atau data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli, tanpa melibatkan proses atau interpretasi oleh pihak lain. Data primer ini diperoleh melalui penelitian atau pengumpulan informasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok peneliti. Jenis data ini biasanya bersifat orisinal dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Data primer berasal dari wawancara atau observasi lapangan.

b) Data sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data tersebut digunakan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Data ini diperoleh dari berbagai instansi terkait, seperti dokumen-dokumen, laporan-laporan, buku-buku, dan hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dengan menggunakan data sekunder ini, kita dapat menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

1.12 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, antara lain:

1. Wawancara; yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau diskusi dengan individu yang memiliki pengetahuan tentang kondisi obyektif dari masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa informan tertentu untuk mengumpulkan informasi yang relevan.

***Tabel 1.5 Data Narasumber***

<b>No.</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	1
2.	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	1
3.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang	1
4.	Masyarakat	3
	Total	6

2. Observasi; adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung subjek penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dengan objek penelitian.
3. Dokumentasi; yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 1.13 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Menurut Bogdan dan Biken dalam (Moleong, 2010) bahwasanya analisis data sebagai upaya untuk menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara lengkap dan dapat dipahami. Adapun teknis analisis dalam penelitian kualitatif ini dapat dijelaskan ke dalam beberapa langkah berikut:

1. Reduksi data

Dimana pada langkah ini yaitu merangkum atau memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting lalu dicari tema dan polanya. Atau dengan kata lain proses yang dilakukan untuk menyederhanakan dan pemilihan data-data kasar atau temuan yang diperoleh di lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk penguraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Pada dasarnya penyajian data ini mendeskripsikan seluruh informasi yang telah terkumpul. Pada penelitian kualitatif, penyajian data paling lazim dalam bentuk teks naratif.

### 3. Penarikan kesimpulan

Dimana pada langkah ini mengemukakan temuan baru yang belum pernah ada atau menarik kesimpulan dari pembahasan yang sudah ada dengan cara data yang dapat menjawab permasalahan yang ada agar didapatkan kesimpulan yang valid.

/